

Pelatihan Akuntansi Keuangan untuk Aparatur Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu

Rini Antika Ritonga^{1*}, Riana Sitio², Tetty Rahmiati Harahap³, Taraweh Harahap⁴, Khairil Anshari⁵

Universitas Islam Labuhan Batu, Labuhanbatu, Indonesia^{1,2,3,4,5}

✉ Email Korespodensi: riniantika.08@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 13-05-2025

Disetujui 14-05-2025

Diterbitkan 16-05-2025

Katakunci:

Pelatihan;

Akuntansi;

Keuangan;

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi dan belum optimal dalam mengimplementasikan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa yaitu Siskeudes. Permasalahan tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi tiga tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi. Pelatihan diberikan dalam bentuk teori dan praktik langsung penggunaan aplikasi Siskeudes serta prinsip dasar akuntansi sektor publik. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta terhadap pengelolaan keuangan desa, baik dari aspek penyusunan laporan, pencatatan transaksi, hingga pelaporan berbasis aplikasi. Evaluasi kegiatan menunjukkan kepuasan mitra terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta munculnya kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik desa. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan permasalahan serupa, serta menjadi kontribusi nyata dunia akademik dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rini Antika Ritonga, Riana Sitio, Tetty Rahmiati Harahap, Taraweh Harahap, & Khairil Anshari. (2025). Pelatihan Akuntansi Keuangan untuk Aparatur Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 99-106. <https://doi.org/10.63822/g4qe0d27>

PENDAHULUAN

Desa Tanjung Siram, yang terletak di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wilayah cukup strategis dalam bidang pertanian dan perkebunan. Wilayah ini secara geografis mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi ini perlu didukung oleh tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan agar pembangunan desa berjalan dengan optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap penguatan kapasitas aparatur desa, terutama dalam pengelolaan keuangan. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendorong desa untuk mandiri secara finansial dan administratif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang mengalami kendala dalam memahami prinsip dan praktik akuntansi keuangan desa. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaporan keuangan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Tanjung Siram menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa belum memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) juga menjadi kendala utama dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran desa. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan terbatasnya pendampingan teknis dari instansi terkait turut memperparah kondisi ini.

Dalam konteks ini, penguatan kapasitas aparatur desa dalam akuntansi keuangan menjadi sangat penting. Pelatihan akuntansi keuangan yang berbasis praktik langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal dapat menjadi solusi strategis dalam memberdayakan aparatur desa. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman teknis tentang pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mendorong terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa (Sari & Nugroho, 2018).

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Desa Tanjung Siram, tetapi juga menjadi fenomena umum di berbagai desa di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa lebih dari 60% aparatur desa di wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam memahami prinsip dasar akuntansi dan implementasi aplikasi Siskeudes. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan yang berpotensi pada ketidaktepatan penggunaan anggaran dan lemahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, pelatihan yang dilakukan secara kolaboratif dengan pihak akademisi dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik. Kolaborasi ini memungkinkan transfer pengetahuan dari perguruan tinggi kepada masyarakat desa, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kapasitas lokal secara berkelanjutan (Putri et al., 2020). Program pelatihan akuntansi keuangan untuk aparatur desa juga sejalan dengan program prioritas nasional dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa).

Berdasarkan hasil diskusi dan observasi lapangan yang dilakukan bersama aparatur Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, telah diidentifikasi dua bidang utama yang menjadi prioritas permasalahan, yakni bidang pengelolaan keuangan dan bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pada aspek pengelolaan keuangan, permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi, pencatatan transaksi

keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan berbasis sistem keuangan desa (Siskeudes). Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan, kesalahan dalam pencatatan anggaran, dan rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan desa. Kondisi ini juga diperparah oleh minimnya pelatihan teknis yang disediakan pemerintah daerah, sehingga aparatur desa mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan desa secara benar (Nugroho & Prasetyo, 2020).

Sub-permasalahan dalam bidang ini meliputi: (1) aparatur desa belum mampu membuat jurnal keuangan yang benar; (2) minimnya kemampuan dalam melakukan klasifikasi anggaran berdasarkan kode rekening; dan (3) belum optimalnya penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam bidang peningkatan kapasitas SDM, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya keterampilan teknis aparatur desa dalam mengikuti perkembangan digitalisasi administrasi keuangan. Sebagian besar dari mereka belum terbiasa dengan penggunaan komputer dan aplikasi keuangan, sehingga proses pelaporan seringkali masih dilakukan secara manual, rentan terhadap kesalahan, dan tidak efisien. Selain itu, kurangnya budaya belajar dan minimnya literasi digital juga menjadi kendala besar dalam upaya penguatan kapasitas SDM (Kurniawan et al., 2019).

Sub-permasalahan pada bidang ini meliputi: (1) keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh aparatur desa; (2) rendahnya motivasi untuk meningkatkan kompetensi profesional secara mandiri; dan (3) belum adanya sistem pelatihan berkelanjutan yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan atau pemerintah. Kedua bidang permasalahan ini telah disepakati bersama mitra sebagai fokus utama kegiatan pengabdian, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan anggaran pembangunan.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, ditawarkan sejumlah solusi yang dirancang secara sistematis, relevan, dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan mitra sasaran. Solusi pertama yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan pelatihan akuntansi dasar terapan. Pelatihan ini akan fokus pada pemahaman konsep-konsep akuntansi yang dibutuhkan dalam konteks pemerintahan desa, termasuk pencatatan transaksi harian, penyusunan jurnal umum, dan proses pembuatan laporan keuangan berbasis sistem keuangan desa. Materi pelatihan akan dikemas dalam bentuk workshop interaktif berbasis studi kasus agar peserta dapat memahami langsung implementasi akuntansi sesuai konteks tugas mereka (Fitriana & Mulyani, 2021).

Dalam pelatihan ini juga akan disediakan modul pelatihan dan lembar kerja yang dirancang khusus agar dapat digunakan secara mandiri setelah kegiatan selesai. Selain itu, solusi ini dilengkapi dengan sesi praktik langsung menggunakan aplikasi Siskeudes yang telah disimulasikan. Dengan cara ini, peserta pelatihan akan terbiasa dengan antarmuka sistem, memahami alur kerja pencatatan, dan mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku. Untuk meningkatkan keberhasilan pelatihan, akan dilakukan pendampingan intensif oleh tim pelaksana dari perguruan tinggi dalam waktu tertentu pascapelatihan. Pendampingan ini dilakukan untuk memantau implementasi ilmu yang telah didapat dan memberi ruang konsultasi teknis jika terdapat hambatan dalam penerapan (Hidayat & Anggraeni, 2020).

Solusi kedua yang ditawarkan untuk menjawab masalah rendahnya kapasitas SDM aparatur desa adalah penyelenggaraan pelatihan literasi digital dan penguasaan teknologi informasi dasar. Dalam kegiatan ini, aparatur desa akan diberikan materi pengenalan komputer, penggunaan aplikasi pengolah kata dan *spreadsheet* (*Microsoft Excel*), serta pelatihan penggunaan internet untuk mengakses regulasi, aplikasi

pemerintah, dan *platform* administrasi digital lainnya. Kegiatan ini penting karena salah satu hambatan utama dalam digitalisasi keuangan desa adalah keterbatasan pengetahuan dasar penggunaan perangkat dan sistem digital (Setyowati & Widodo, 2021).

Program pelatihan ini akan menggunakan pendekatan praktik langsung dengan metode tutor sebaya dan bimbingan kelompok kecil. Peserta pelatihan akan diajarkan cara membuat laporan keuangan menggunakan template spreadsheet yang telah disesuaikan dengan struktur laporan desa, sehingga ketika tidak terhubung dengan aplikasi digital yaitu Siskeudes, mereka masih dapat membuat laporan akurat secara manual. Di samping itu, solusi ini juga akan menanamkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik, dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dalam pengelolaan dana publik (Supriyadi, 2022). Untuk menunjang keberlanjutan solusi, tim pelaksana juga akan membentuk kelompok belajar desa yang terdiri dari aparatur yang telah mengikuti pelatihan. Kelompok ini diharapkan menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan saling mendukung dalam mengatasi permasalahan teknis sehari-hari terkait akuntansi dan digitalisasi administrasi desa.

Selain pelatihan dan pendampingan teknis, pendekatan penyelesaian masalah juga dilakukan melalui integrasi dengan institusi lokal yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat untuk memastikan kontrol sosial dalam pelaksanaan akuntansi desa. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem tata kelola keuangan desa yang lebih terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *good village governance* yang menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa (Yuliana, 2021).

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dalam program pengabdian ini bersifat menyeluruh dan saling mendukung antarbidang. Pelatihan akuntansi dasar dan praktik aplikasi Siskeudes akan menjawab masalah pencatatan dan pelaporan, sementara pelatihan literasi digital dan teknologi informasi akan memperkuat kapasitas SDM aparatur desa. Semua solusi ini dirancang untuk diterapkan secara bertahap, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan mitra, sehingga dapat meningkatkan kemandirian desa dalam hal tata kelola keuangan secara profesional dan akuntabel.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara sistematis agar dapat mencapai tujuan utama program PKM, yaitu meningkatkan kompetensi aparatur Desa Tanjung Siram dalam pengelolaan akuntansi keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Terdapat tiga tahap utama dalam pelaksanaan program, yaitu tahap sosialisasi, tahap pelatihan, dan tahap evaluasi. Ketiga tahap ini saling terintegrasi untuk memastikan ketercapaian luaran program secara optimal dan berkelanjutan.

Tahap Sosialisasi

Tahap pertama adalah sosialisasi program, yang merupakan langkah awal dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi antara tim pelaksana PKM dengan aparatur desa serta pihak-pihak terkait, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sosialisasi dilakukan secara langsung di Kantor Desa Tanjung Siram dan difasilitasi oleh perangkat desa. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana memaparkan latar belakang kegiatan, tujuan, manfaat, jadwal pelaksanaan, materi pelatihan,

serta output yang diharapkan. Tahap ini juga bertujuan untuk membangun kesepahaman mengenai urgensi pelatihan akuntansi keuangan serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan waktu kerja dan kesediaan mitra. Proses sosialisasi dilengkapi dengan diskusi terbuka untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta, serta menjangkau masukan awal agar pelatihan lebih kontekstual dan aplikatif.

Tahap Pelatihan

Tahap kedua adalah **tahap pelatihan**, yang menjadi inti dari kegiatan PKM ini. Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari secara bertahap, dengan pendekatan andragogi yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dan orientasi pada pemecahan masalah nyata. Pelatihan terbagi ke dalam dua materi utama, yaitu pelatihan akuntansi dasar pemerintahan desa dan pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes. Pada hari pertama, peserta dikenalkan pada prinsip-prinsip dasar akuntansi, termasuk pencatatan transaksi keuangan, penyusunan jurnal umum, hingga laporan keuangan sederhana. Metode pelatihan menggunakan kombinasi ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok, agar peserta dapat mengaitkan materi dengan aktivitas keuangan di lingkungan kerja mereka.

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), termasuk pengenalan fitur-fitur utama, simulasi entri data keuangan, dan cara menghasilkan laporan melalui sistem tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, peserta diberikan modul pelatihan yang berisi panduan langkah demi langkah serta latihan soal. Peserta juga diberi kesempatan mencoba secara langsung pada perangkat komputer atau laptop yang disediakan secara bergiliran. Selain itu, instruktur dari tim PKM memberikan bimbingan langsung secara personal kepada peserta yang mengalami kesulitan teknis.

Pada hari ketiga, kegiatan pelatihan ditutup dengan praktik menyusun laporan keuangan desa secara utuh, mulai dari input transaksi harian hingga menghasilkan laporan akhir. Peserta diminta bekerja dalam kelompok berdasarkan jabatan fungsional di desa (misalnya: bendahara dan sekretaris), sehingga praktik lebih sesuai dengan peran masing-masing. Di akhir sesi pelatihan, dilakukan forum diskusi reflektif untuk menggali pengalaman peserta selama pelatihan, hambatan yang dihadapi, serta saran untuk pengembangan kegiatan di masa mendatang.

Tahap Evaluasi

Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan, yang mencakup dua aspek utama: evaluasi hasil pelatihan dan evaluasi keberlanjutan dampak. Evaluasi hasil pelatihan dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Hasil dari tes ini dianalisis secara kuantitatif untuk melihat efektivitas pelatihan. Selain itu, dilakukan penilaian unjuk kerja melalui hasil praktik penyusunan laporan keuangan. Evaluasi keberlanjutan dilakukan satu bulan pascapelatihan melalui kunjungan lapangan dan wawancara langsung dengan peserta dan kepala desa. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana aparatur desa telah mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan administrasi keuangan sehari-hari, serta mengetahui tantangan baru yang muncul pascapelatihan.

Untuk memastikan keberlanjutan manfaat kegiatan, tim pelaksana PKM juga memberikan fasilitas konsultasi daring melalui grup WhatsApp dan pertemuan rutin bulanan selama tiga bulan setelah pelatihan. Melalui metode pelaksanaan yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan mitra ini, diharapkan

kompetensi akuntansi aparatur desa meningkat, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel, dan transparansi publik dapat lebih terwujud secara nyata di Desa Tanjung Siram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelatihan Akuntansi Keuangan untuk aparatur Desa Tanjung Siram telah dilaksanakan dengan tiga tahapan utama, yakni tahap sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari mitra sasaran. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pendekatan partisipatif, pemetaan kebutuhan awal, serta penggunaan metode pelatihan yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta.

Pada tahap sosialisasi, tim pengabdian berhasil membangun komunikasi yang konstruktif dengan perangkat desa. Hasil diskusi awal mengungkapkan bahwa sebagian besar aparatur belum memahami prinsip dasar akuntansi dan mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Masalah ini sejalan dengan temuan Siregar dan Manurung (2021), yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Sosialisasi ini sangat membantu dalam merancang pelatihan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Selama tahap pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta secara signifikan. Ini dibuktikan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan skor rata-rata sebesar 35%. Selain itu, peserta tampak aktif selama sesi diskusi dan praktik, yang menunjukkan adanya motivasi internal untuk belajar. Keaktifan ini mendukung konsep pembelajaran orang dewasa (andragogi), di mana peserta lebih termotivasi apabila materi pelatihan berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari (Knowles et al., 2015).



Gambar 1. Tahap pelatihan

Pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes merupakan bagian yang paling diminati oleh peserta. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi teknologi dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (2020) bahwa digitalisasi pelaporan keuangan melalui Siskeudes adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Praktik langsung dengan simulasi kasus riil terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis peserta, terutama dalam menginput transaksi dan menghasilkan laporan keuangan desa.

Selain hasil kuantitatif berupa peningkatan skor tes, dampak nyata dari pelatihan juga terlihat dari praktik peserta dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peserta mampu menyusun dokumen-dokumen penting yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran. Ini membuktikan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberi kontribusi langsung pada praktik kerja aparatur desa.

Pada tahap evaluasi lanjutan yang dilakukan satu bulan pascapelatihan, tim PKM menemukan bahwa sebagian besar peserta telah menerapkan keterampilan yang diperoleh. Mereka menyatakan bahwa pelatihan telah membantu mempercepat proses administrasi keuangan dan meminimalisir kesalahan pencatatan. Evaluasi ini sejalan dengan temuan dari Mardiasmo (2018), yang menyebutkan bahwa pelatihan berbasis praktik nyata mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan sektor publik.

Lebih jauh, keberadaan grup WhatsApp yang dibuat setelah pelatihan berfungsi sebagai forum diskusi dan konsultasi teknis. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendampingan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat desa. Keberlanjutan ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan PKM, sebagaimana dikemukakan oleh Supriatna (2019), bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari kegiatan pelatihan semata, melainkan dari sejauh mana dampak kegiatan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dari pelaksanaan ini, dapat disimpulkan bahwa program PKM yang dirancang berbasis kebutuhan mitra, dipadukan dengan pendekatan praktik langsung, serta pendampingan pascapelatihan, terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Oleh karena itu, model pelatihan ini dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa, guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara nasional.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa *Pelatihan Akuntansi Keuangan untuk Aparatur Desa Tanjung Siram* memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kegiatan ini mampu menjawab permasalahan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip dasar akuntansi serta keterbatasan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan keuangan desa.

Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi, tim pelaksana berhasil membangun komunikasi yang baik dengan mitra, menyusun program pelatihan berbasis kebutuhan, serta memberikan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, baik secara teoritis maupun praktis, yang kemudian

diterapkan langsung dalam kegiatan administrasi keuangan desa. Evaluasi lanjutan juga menunjukkan bahwa pelatihan ini berdampak nyata dalam mendorong efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas keuangan desa.

Dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata, program PKM ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas aparatur desa secara individual, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan desa secara kelembagaan. Oleh karena itu, model pelatihan ini dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan serupa di desa-desa lain, terutama dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana, R., & Mulyani, N. (2021). Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan akuntansi berbasis kebutuhan lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 135–144. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rn62p>
- Hidayat, T., & Anggraeni, D. (2020). Implementasi pelatihan sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 8(1), 25–33. <https://doi.org/10.24912/jea.v8i1.845>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes versi 2.0*. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman umum pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Kurniawan, A., Widiyanto, D., & Astuti, S. (2019). Tantangan SDM dalam tata kelola keuangan desa: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.14710/jap.v6i1.8373>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri, R. D., Prasetyo, Z. K., & Yuliana, S. (2020). Pelatihan akuntansi bagi aparatur desa dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 125–132. <https://doi.org/10.22219/jpkm.v6i2.12345>
- Sari, M., & Nugroho, A. (2018). Peningkatan pemahaman akuntansi pada perangkat desa melalui pelatihan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 45–52. <https://doi.org/10.20473/jiab.v3i1.2018.45-52>
- Setyowati, N., & Widodo, S. (2021). Literasi digital aparatur desa dalam mendukung transparansi keuangan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.22225/jta.3.2.2021.88-96>
- Siregar, M. H., & Manurung, M. A. (2021). Penguatan kapasitas SDM pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, 6(2), 125–134.
- Supriatna, N. (2019). Pendekatan pemberdayaan dalam pengabdian masyarakat: Studi kasus di wilayah pedesaan. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 3(1), 22–30.
- Supriyadi, H. (2022). Membangun integritas dalam pengelolaan keuangan publik desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(1), 44–52. <https://doi.org/10.25077/jap.v9i1.568>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyuni, T. (2019). Evaluasi penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(1), 89–98. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7b9hr>
- Yuliana, S. (2021). Good village governance: Kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(3), 112–120. <https://doi.org/10.20885/jips.v2i3.8193>